

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2024

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/5527/PK.02.02/XII/2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/2088/PK.02.02/VII/2020 tentang

Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah

Keputusan Kepala BP2MI Nomor 174 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia

Keputusan Kepala BP2MI Nomor 323 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Sumber Referensi lain:

Adinda, J. (2019). Gagasan Human Security dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perbandingannya dengan Kebijakan Kekerasan Seksual di Jepang. *Responsive*, 2, 8–13.

Annur, C. (2020, September 7). Remitansi Pekerja Migran Indonesia Terbesar Berasal dari 5 Negara | Databoks. *Databoks*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/07/remitansi-pekerja-migran-indonesia-terbesar-berasal-dari-5-negara>

Anggraeni, R. (2022, January 16). Kemenaker Gagalkan Pengiriman 25 Calon TKI Ilegal ke Arab Saudi. *INews.Id*.

<https://www.inews.id/finance/bisnis/kemenaker-gagalkan-pengiriman-25-calon-tki-ilegal-ke-arab-saudi>

Arab Saudi Ternyata Tak Punya UU Tenaga Kerja. (n.d.). Retrieved June 6, 2021, from <https://www.viva.co.id/berita/dunia/191469-arab-saudi-tidak-miliki-uu-tenaga-kerja>

BP2MI. (n.d.). Sejarah BP2MI. Retrieved from <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. (n.d.). Retrieved June 6, 2021, from <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>

BP2MI / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. (2022, April 15). BP2MI. <https://www.bp2mi.go.id/gtog-detail/jerman/pengumuman-pendaftaran-penempatan-calon-kandidat-pekerja-migran-indonesia-pmi-perawat-program-g-to-g-di-jerman-batch-ii-tahun-2022>

BP2MI / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. (2021, September 20). BP2MI. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/aots-apresiasi-bp2mi-laksanakan-program-g-to-g-jepang-batch-14>

BP2MI. (2022, March 18). Hingga Gelombang ke-19, 1.087 CPMI Program G to G Berangkat ke Korea Selatan. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/hingga-gelombang-ke-19-1-087-cpmi-program-g-to-g-berangkat-ke-korea-selatan>

Cinthy Prativi, D. (2019). Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode

2014-2018. *Journal of International Relations*, 5, 592–598. Retrieved from
[http://ejournal-](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi)
[s1.undip.ac.id/index.php/jihi](http://www.fisip.undip.ac.id)Website:<http://www.fisip.undip.ac.id>

DATA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI PERIODE TAHUN 2020.
 (2021). Jakarta.

BP2MI. (2021). *Data Pmi Periode Tahun 2021.*

BP2MI. (2020). *Refleksi capaian 9 program prioritas.*

Diamastuti, E. (n.d.). *PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN SEBUAH TELAAH KRITIS.* Surabaya.

DISNAKERTRANS - SOSIALISASI PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PROGRAM G TO G KE KOREA SELATAN. (n.d.).
 Retrieved May 27, 2022, from
<https://nakertrans.kulonprogo.go.id/detil/1025/sosialisasi-penempatan-pekerja-migran-indonesia-pmi-program-g-to-g-ke-korea-selatan>

Erawan, W. (2021). STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PEMBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *JURNAL COMM-EDU*, 4, 29–37.
<https://www.journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/view/6928/2201>

Hadiwinata, B. S. (Bob S. (2017). *Studi dan teori hubungan internasional : arus utama, alternatif, dan reflektif.* Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hamid, A. (2019). *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

International Labour Office., & International Labour Office. Area Office, J. (2006). *Hak-hak pekerja migran : buku pedoman untuk serikat pekerja Indonesia*. Organisasi Perburuhan Internasional.

INFORMASI SSW/ PBS : Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020, July).

Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia.

<https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/folders/43000570933>

Irianto, S. (2011). *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Retrieved from <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/23904>

Jemput Dua PMI yang Bebas dari Penempatan Ilegal, Kepala BP2MI: Perang Total Tidak Akan Dihentikan. (2021, September 24). BP2MI.

<https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/jemput-dua-pmi-yang-bebas-dari-penempatan-ilegal-kepala-bp2mi-perang-total-tidak-akan-dihentikan>

Khasanah, N. (2019). *Hubungan Internasional*. (K. Fa'izia, Ed.). Klaten: PT Cempaka Putih. Retrieved from <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/157637>

KEMLU. (2019). *Kemlu Ri Kembali Gaungkan Kesepakatan Global Migrasi / Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.*

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/548/berita/kemlu-ri-kembali-gaungkan-kesepakatan-global-migrasi>

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi.* Jakarta: LP3ES.

McGlinhey, S., Walters, R., & Scheinflug, C. (2017). *Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional.* (T. A. Mukti, Ed.). Yogyakarta: E-International Relations.

Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru / Imigrasi Kotabumi. (2022, January 3). Kantor Imigrasi Kotabumi.

https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/negara_tujuan_pmi_new_normal

Noveria, M., Aswatini, Fitranita, & Dkk. (2020). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kesepakatan dan Implementasinya).* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Organisasi Perburuhan Internasional. (n.d.). *Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan: Global Compact - Perserikatan Bangsa-Bangsa.*

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_126247.pdf

- Payman J, S. (2004). Perlindungan Tenaga Kerja Illegal di Malaysia. *Jurnal Informasi Hukum*, 2.
- Pangestu, S., Primawati, H., & Finaldin, T. (2020). *DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI*. Bandung.
- Penulis, T. (2019). BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM PROSES MIGRASI KETENAGAKERJAAN Serikat Buruh Migran Indonesia “ Lawan Sekarang Atau Tertindas Selamanya .”
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2024
- Putri, V., Mahesa, G., & Fauzi, I. S. dkk. (2020). *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara*. Pontianak: PT Scopindo Media Pustaka.
- Retrieved from <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/170670>
- Ratnaningsih, E. (2017). *PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*. Binus University Business Law. <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>

- Rosalina, H., & Lazarus. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, 174–187.
- Rusiana, D. (2021, December 18). Sumbang Devisa Tertinggi Kedua Setelah Migas, Dana Remitansi PMI Capai Rp160 Triliun. *IDXchannel.Com*.
<https://www.idxchannel.com/economics/sumbang-devisa-tertinggi-kedua-setelah-migas-dana-remitansi-pmi-capai-rp160-triliun>
- Steans, J., & Pettiford, L. (2009). *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. (D. S. Sari, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamba, R. T. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1, 199–221.
- Trisnawati, D., Astuti, P., & Astrika, L. (2015). Peran Pemerintah dalam Memeberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan *Journal of Politic and ...*, (14010110141026). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/8212>
- UNDP. (2013). *Human Development Report 1994*. Retrieved from <https://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1994>
- Utami, D. N. (2020). UPAYA INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 8, 848–860.

- Wirawan, I. B. (2011). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)* (Pertama). Surabaya: Kharisma Putra Utama . Retrieved from <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/65102>
- Yasinta, C. (2018). *Peran Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Dalam Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Hongkong*. Universitas Pasundan, Bandung.
- 5 CPMI Program G to G Jerman Melakukan Interview di UPT BP2MI Pontianak / BP2MI Pontianak. (2021). <https://bp2mipontianak.org/5-cpmi-program-g-to-g-jerman-melakukan-interview-di-upt-bp2mi-pontianak/>